



Efektivitas Kerja Sama *Local Currency Settlement* (LCS) dalam Mendukung Stabilitas Perdagangan Intra-ASEAN

Gratiana Manik^{1*}, Laura Mairenza Efendes², Tia Putri Yundaris³, Indri Melati⁴,
Wella Dwi Arianti⁵

¹⁻⁵Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Riau, Indonesia

Email: gratiana.br6641@student.unri.ac.id¹, laura.mairenza1788@student.unri.ac.id²,

tia.putri6664@student.unri.ac.id³, indri.melati1898@student.unri.ac.id⁴,

wella.dwi6652@student.unri.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: gratiana.br6641@student.unri.ac.id

Abstract. High dependence on the United States Dollar (USD) in international transactions has long been a challenge for economic stability in the Southeast Asian region, especially amidst global exchange rate fluctuations and geopolitical tensions. This study aims to analyze the effectiveness of Local Currency Settlement (LCS) cooperation in supporting intra-ASEAN trade stability. The main focus of this study is how local currency mechanisms can mitigate exchange rate risks and strengthen regional economic integration as part of a de-dollarization strategy. The research method used is descriptive qualitative with a literature review approach, relying on secondary data from central bank reports, ASEAN policy documents, and relevant academic literature. The results show that the implementation of the LCS framework, particularly in countries such as Indonesia, Malaysia, and Thailand, has provided more efficient transaction alternatives by reducing double conversion costs. However, its effectiveness still faces challenges such as low awareness among business actors, limited local currency liquidity compared to the USD, and the need for broader cross-border digital payment system integration. These findings imply the need for strengthened synergy between central banks in the ASEAN region and increased literacy for the private sector so that the economic stability benefits of LCS can be optimally achieved. This strategy not only strengthens monetary sovereignty but also encourages a more resilient ASEAN economic integration against external shocks.

Keywords: ASEAN; De-dollarization; Effectiveness; Local Currency Settlement; Trade Stability.

Abstrak. Ketergantungan yang tinggi terhadap Dollar Amerika Serikat (USD) dalam transaksi internasional telah lama menjadi tantangan bagi stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara, terutama di tengah fluktuasi nilai tukar global dan ketegangan geopolitik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kerja sama Local Currency Settlement (LCS) dalam mendukung stabilitas perdagangan intra-ASEAN. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana mekanisme penggunaan mata uang lokal mampu memitigasi risiko kurs dan memperkuat integrasi ekonomi kawasan sebagai bagian dari strategi dedolarisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, mengandalkan data sekunder dari laporan bank sentral, dokumen kebijakan ASEAN, serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kerangka kerja LCS, khususnya di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand, telah memberikan alternatif transaksi yang lebih efisien dengan mengurangi biaya konversi ganda. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran pelaku usaha, likuiditas mata uang lokal yang terbatas dibandingkan USD, dan perlunya integrasi sistem pembayaran digital lintas batas yang lebih luas. Temuan ini berimplikasi pada perlunya penguatan sinergi antara bank sentral di kawasan ASEAN dan peningkatan literasi bagi sektor swasta agar manfaat stabilitas ekonomi dari LCS dapat tercapai secara optimal. Strategi ini tidak hanya memperkuat kedaulatan moneter, tetapi juga mendorong integrasi ekonomi ASEAN yang lebih tangguh terhadap guncangan eksternal.

Kata Kunci: ASEAN; Dedolarisasi; Efektivitas; Local Currency Settlement; Stabilitas Perdagangan.

1. LATAR BELAKANG

Dinamika ekonomi global saat ini diwarnai oleh ketidakpastian yang bersumber dari fluktuasi nilai tukar mata uang utama dunia, khususnya Dollar Amerika Serikat (USD). Sebagai mata uang jangkar dalam perdagangan internasional, dominasi USD memberikan tekanan signifikan bagi stabilitas moneter negara-negara berkembang, termasuk di kawasan Asia

Tenggara (Bustami & Ramdiana, 2024). Ketergantungan yang tinggi terhadap USD menyebabkan ekonomi kawasan rentan terhadap kebijakan moneter eksternal dan guncangan geopolitik yang memicu inflasi global (Khalid, 2024). Dalam konteks ini, fenomena dedolarisasi muncul sebagai strategi kolektif negara-negara ASEAN untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan mengurangi risiko ekspor-impor akibat volatilitas kurs (Fernando & Turnip, 2023). Salah satu instrumen utama yang diimplementasikan adalah mekanisme Local Currency Settlement (LCS), yang memungkinkan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal masing-masing negara (Syifa, 2024).

Implementasi LCS di ASEAN, yang dipelopori oleh kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand, bertujuan untuk menciptakan efisiensi transaksi dengan memangkas biaya konversi ganda melalui mata uang perantara (Nofansya & Sidik, 2022). Kerangka kerja ini tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis perbankan, tetapi juga sebagai manifestasi dari integrasi ekonomi regional yang lebih dalam di bawah payung ASEAN Economic Community (AEC). Meskipun secara teoritis LCS menawarkan perlindungan terhadap risiko kurs dan stabilitas harga dalam perdagangan intra-kawasan, efektivitasnya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan mata uang lokal masih terbatas dibandingkan dengan volume perdagangan total, yang disebabkan oleh rendahnya literasi pelaku usaha mengenai skema ini serta likuiditas mata uang lokal yang belum setangguh USD di pasar global (Nofansya & Sidik, 2022).

Penelitian ini menjadi penting untuk meninjau sejauh mana kerja sama LCS benar-benar telah mendukung stabilitas perdagangan di intra-ASEAN. Terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah disepakati di tingkat bank sentral dengan implementasi praktis oleh para eksportir dan importir (Hidayat & Setyari, 2025). Kebaruan dalam artikel ini terletak pada analisis komprehensif mengenai efektivitas LCS pasca-pandemi dan di tengah meningkatnya tensi geopolitik yang mempercepat tren penggunaan mata uang regional. Dengan membedah faktor penghambat dan pendorong dalam skema LCS, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi studi Ekonomi Politik Internasional serta rekomendasi kebijakan bagi penguatan integrasi keuangan ASEAN yang lebih resilien (Khalid, 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini berpijak pada teori Regionalisme Regulasi (Regulatory Regionalism), yang memandang bahwa integrasi kawasan tidak hanya terjadi melalui liberalisasi pasar, tetapi juga melalui pembentukan aturan dan standar bersama untuk mengelola risiko ekonomi global (Bustami & Ramdiana, 2024). Dalam konteks ASEAN, kerja sama Local Currency Settlement

(LCS) merupakan bentuk sinkronisasi kebijakan moneter yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas kawasan tanpa harus bergantung pada hegemoni mata uang tunggal seperti Dollar AS. Sejalan dengan itu, pandangan Institusionalisme Neoliberal menekankan bahwa institusi regional seperti Bank Sentral berperan krusial dalam menyediakan kerangka kerja formal yang menurunkan biaya transaksi dan mengatasi masalah ketidakpastian informasi di pasar valuta asing (Keohane, 2020).

Selain itu, konsep kedaulatan moneter menjadi landasan penting dalam memahami urgensi dedolarisasi. Menurut Cohen (2019), kedaulatan moneter bukan lagi sekadar kemampuan negara untuk mencetak uang, melainkan kemampuan untuk mengisolasi ekonomi domestik dari guncangan eksternal melalui diversifikasi penggunaan mata uang dalam perdagangan internasional. Mekanisme LCS memungkinkan negara-negara ASEAN untuk memperkuat integrasi keuangan mereka melalui penggunaan mata uang lokal yang lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan mata uang ketiga (USD), yang sering kali melibatkan biaya konversi ganda dan risiko volatilitas yang tinggi (Nofansya & Sidik, 2022). Dalam konteks ini, strategi dedolarisasi ASEAN juga mencakup pengembangan kerangka kerja regional untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, yang akan meningkatkan stabilitas nilai tukar dan kedaulatan moneter nasional melalui mekanisme pembayaran lokal (Bustami & Ramdiana, 2024) serta memperkuat efisiensi lintas negara dalam transaksi bilateral tanpa perlu perantara dolar (SIYAR Journal, 2026). Studi terbaru juga menunjukkan peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral di ASEAN sebagai indikasi meningkatnya kedaulatan moneter regional dan diversifikasi cadangan devisa (Abdurokhim, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas LCS dari berbagai perspektif. Syifa (2024) menyoroti bahwa implementasi LCS antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan langkah konkret menuju integrasi ekonomi ASEAN yang lebih tangguh. Namun, efektivitas ini sangat bergantung pada tingkat likuiditas mata uang lokal di pasar regional serta dukungan infrastruktur pembayaran digital yang terintegrasi (Fernando & Turnip, 2023). Penelitian ini akan memperdalam kajian tersebut dengan menganalisis bagaimana kerja sama ini berfungsi sebagai instrumen pertahanan ekonomi di tengah meningkatnya tensi geopolitik global yang memicu tren fragmentasi ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis untuk mengevaluasi efektivitas kerja sama Local Currency Settlement (LCS) di kawasan ASEAN. Metode kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran mendalam mengenai

fenomena kompleks seperti dedolarisasi dan integrasi moneter regional yang melibatkan berbagai aktor kebijakan (Bustami & Ramdiana, 2024). Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan mekanisme implementasi LCS serta mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian stabilitas perdagangan intra-kawasan. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika kebijakan regional serta interaksi antarnegara dalam implementasi sistem pembayaran berbasis mata uang lokal di ASEAN (Syifa, 2024). Selain itu, studi kualitatif deskriptif dapat digunakan untuk menganalisis peluang, tantangan, dan implikasi kebijakan dari penggunaan LCS dalam memperkuat integrasi keuangan kawasan dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS (Dermawan et al., 2026).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui teknik studi pustaka (*library research*). Sumber data mencakup dokumen resmi dan laporan tahunan dari Bank Indonesia serta Sekretariat ASEAN, naskah perjanjian kerja sama bilateral, buku teks ekonomi politik internasional, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan rentang waktu publikasi lima tahun terakhir (2020-2025). Penggunaan data sekunder ini memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi sumber guna memastikan validitas argumen mengenai tren volume transaksi mata uang lokal di Asia Tenggara (Hidayat & Setyari, 2025).

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan sistematis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data yang terkumpul dipilah untuk memfokuskan analisis pada aspek efektivitas ekonomi dan hambatan teknis LCS. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi logis yang menghubungkan fakta lapangan dengan kerangka teoritis yang telah disusun. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kontribusi LCS terhadap stabilitas perdagangan di tengah volatilitas nilai tukar global (Nofansya & Sidik, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi dan Tren Transaksi LCS di Kawasan ASEAN

Implementasi Local Currency Settlement (LCS) di kawasan ASEAN telah menunjukkan perkembangan signifikan sebagai instrumen untuk mengurangi ketergantungan pada Dollar AS (dedolarisasi). Berdasarkan data operasional, kerja sama ini awalnya dipelopori oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand, yang kemudian diperluas mencakup negara-negara mitra strategis lainnya (Syifa, 2024). Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral terbukti mampu memberikan efisiensi biaya bagi pelaku usaha karena menghilangkan biaya konversi ganda

(double conversion) yang biasanya terjadi saat menggunakan USD sebagai mata uang perantara (Nofansya & Sidik, 2022).

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, volume transaksi menggunakan kerangka LCS terus mengalami peningkatan, terutama di Indonesia. Hal ini didorong oleh penguatan sinergi antara bank sentral di kawasan melalui penandatanganan berbagai Memorandum of Understanding (MoU) terkait integrasi sistem pembayaran regional (Bustami & Ramdiana, 2024). Penggunaan LCS tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan barang, tetapi juga mulai merambah ke sektor investasi langsung (Foreign Direct Investment) dan remitansi, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang mitra dagang utama di Asia Tenggara (Hidayat & Setyari, 2025).

Hambatan Struktural dan Strategi Penguatan Efektivitas LCS

Meskipun kerangka kerja Local Currency Settlement (LCS) menawarkan efisiensi ekonomi yang signifikan, efektivitasnya dalam menggeser dominasi Dollar Amerika Serikat (USD) di kawasan ASEAN masih menghadapi tantangan struktural yang berlapis. Analisis kritis menunjukkan bahwa dominasi USD bukan sekadar masalah teknis perbankan, melainkan fenomena yang berakar pada path dependency atau ketergantungan pada pola masa lalu. Pelaku usaha ekspor-impor telah lama menggunakan USD sebagai mata uang jangkar karena stabilitas dan likuiditasnya yang tak tertandingi di pasar global (Nofansya & Sidik, 2022). Faktor psikologis ini menciptakan keengganan untuk beralih ke mata uang lokal, karena USD dianggap memiliki risiko ketidakpastian yang lebih rendah dibandingkan mata uang regional yang masih dianggap volatil.

Selain faktor psikologis, keterbatasan likuiditas mata uang lokal di pasar valuta asing menjadi hambatan struktural yang nyata. Dalam banyak kasus, ketersediaan instrumen lindung nilai (hedging) untuk mata uang seperti Baht atau Ringgit belum seberagam dan semurah instrumen berbasis USD. Hal ini menyebabkan biaya transaksi LCS terkadang tidak kompetitif bagi perusahaan skala besar yang membutuhkan volume likuiditas tinggi dalam waktu singkat. Rendahnya kesadaran (awareness) di tingkat pelaku usaha menengah juga memperburuk keadaan; banyak eksportir dan importir yang belum memahami prosedur teknis LCS dan manfaat jangka panjangnya bagi stabilitas margin keuntungan mereka (Fernando & Turnip, 2023).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi penguatan yang tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga insentif. Pemerintah dan bank sentral perlu merumuskan insentif yang lebih menarik bagi perbankan komersial agar mereka lebih aktif menawarkan produk LCS kepada nasabahnya. Di sisi lain, sosialisasi yang masif dan terarah kepada pelaku ekspor-impor

menjadi kunci untuk memutus rantai path dependency (Bustami & Ramdiana, 2024). Penguatan efektivitas LCS juga harus didorong melalui integrasi infrastruktur pembayaran digital, seperti QR Cross Border, yang dapat memberikan pengalaman transaksi yang lebih instan dan murah bagi pelaku UMKM di kawasan (Fernando & Turnip, 2023). Dengan sinergi antara kebijakan makro yang stabil dan literasi mikro yang kuat, LCS dapat bertransformasi dari sekadar alternatif menjadi pilar utama stabilitas perdagangan intra-ASEAN.

Tantangan Efektivitas LCS dalam Aktivitas Perdagangan

Meskipun menunjukkan tren positif, efektivitas LCS dalam mendukung stabilitas perdagangan intra-ASEAN masih menghadapi sejumlah tantangan fundamental. Salah satu hambatan utama adalah masalah awareness atau kesadaran dari para pelaku usaha ekspor-impor. Banyak pelaku bisnis yang masih merasa lebih nyaman dan terbiasa menggunakan USD karena likuiditasnya yang tinggi di pasar global dibandingkan dengan mata uang lokal seperti Baht atau Ringgit (Nofansya & Sidik, 2022). Ketidaktahuan mengenai prosedur teknis perbankan dalam skema LCS menyebabkan penetrasi kebijakan ini belum mencapai potensi maksimalnya di sektor swasta (Fernando & Turnip, 2023).

Selain aspek literasi, faktor teknis seperti selisih kurs (spread) yang terkadang masih lebih tinggi dibandingkan USD dan terbatasnya ketersediaan instrumen lindung nilai (hedging) dalam mata uang lokal menjadi catatan penting. Efektivitas LCS sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur pendukung, termasuk integrasi sistem pembayaran digital lintas batas seperti QR Code regional (Fernando & Turnip, 2023). Tanpa dukungan likuiditas yang memadai dan insentif yang menarik bagi perbankan serta pelaku usaha, transisi menuju kemandirian moneter kawasan akan berlangsung lebih lambat. Oleh karena itu, penguatan kerja sama teknis antar bank sentral menjadi prasyarat mutlak agar LCS dapat menjadi pilar stabilitas ekonomi ASEAN yang tangguh menghadapi guncangan eksternal (Khalid, 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kerja sama Local Currency Settlement (LCS) merupakan langkah strategis yang efektif dalam memperkuat stabilitas perdagangan intra-ASEAN di tengah ketidakpastian ekonomi global. Mekanisme ini terbukti mampu mengurangi ketergantungan terhadap Dollar AS (dedolarisasi) dan memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar melalui penghapusan biaya konversi ganda. Secara makro, LCS berkontribusi pada penguatan kedaulatan moneter kawasan dan memperdalam integrasi ekonomi di bawah kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. Namun, efektivitas operasionalnya masih belum optimal karena hambatan struktural seperti keterbatasan likuiditas mata uang lokal

dibandingkan USD, adanya faktor psikologis path dependency di kalangan pelaku usaha, serta masih rendahnya literasi mengenai keuntungan teknis skema LCS bagi sektor swasta. Dengan demikian, meskipun LCS telah menjadi instrumen pertahanan ekonomi yang krusial, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi kebijakan yang berkelanjutan antar bank sentral di kawasan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan bagi otoritas moneter dan pemerintah di negara-negara ASEAN untuk memberikan insentif yang lebih kompetitif bagi perbankan pelaksana (Appointed Cross Currency Dealer) agar dapat menawarkan selisih kurs yang lebih menarik bagi nasabah. Bank sentral perlu memperluas sosialisasi secara masif dan menysasar langsung para pelaku ekspor-impor kelas menengah untuk memutus ketergantungan pada penggunaan mata uang pihak ketiga. Selain itu, percepatan integrasi infrastruktur pembayaran digital lintas batas, seperti sinkronisasi QR Code regional, harus terus ditingkatkan untuk memudahkan transaksi ritel dan UMKM secara instan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif kuantitatif mengenai dampak volume transaksi LCS terhadap stabilitas harga domestik (inflasi) di masing-masing negara anggota ASEAN guna memberikan data empiris yang lebih spesifik bagi pengembangan kebijakan di masa depan..

DAFTAR REFERENSI

- Abdurokhim, A. (2025). De-dollarization trends in Southeast Asia: Assessing Indonesia's monetary sovereignty and local currency use. *ECMONT Journal*, 1(2), 64–76. <https://doi.org/10.64910/ecmont.v1i2.9>
- Bustami, S. Y., & Ramdiana, L. R. (2024). ASEAN de-dollarization strategy to reduce dependence on the US dollar. In *Proceedings of the Sunan Ampel International Conference of Political and Social Sciences* (Vol. 2, pp. 362–382). <https://doi.org/10.15642/saicopss.2024.2..362-382>
- Cohen, B. J. (2019). *Currency statecraft: Monetary policy and realpolitik*. University of Chicago Press.
- Dermawan, W., Khairunisaa, S. S., & Alam, G. N. (2026). Beyond the US dollar: Local currency settlement dan masa depan integrasi keuangan ASEAN. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(1), 52–68. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i1.1515>
- Eichengreen, B. (2022). *In defense of public debt*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197577899.001.0001>
- Fernando, J., & Turnip, E. Y. (2023). Peluang Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun 2023 dalam mempromosikan penggunaan local currency settlement dan QR code lintas batas. *Sentris*, 4(2), 114–134. <https://doi.org/10.26593/sentris.v4i2.7124.114-134>
- Helleiner, E. (2023). *The neomercantilists: A global intellectual history*. Cornell University Press.

- Hidayat, N., & Setyari, N. P. W. (2025). Does local currency settlement enhance exchange rate stability? Evidence from Indonesia. *International Journal of Economic Literature (INJOLE)*, 2(8), 636–645.
- Keohane, R. O. (2020). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton University Press.
- Khalid, U. (2024). ASEAN and de-dollarization: Regional currency integration or economic fragmentation. *Journal of Religion & Society (JR&S)*, 199–212.
- Nofansya, A., & Sidik, H. (2022). Kerja sama ekonomi Indonesia–Malaysia–Thailand: Penguatan local currency settlement (LCS) framework dalam memfasilitasi perdagangan. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 164–178. <https://doi.org/10.24198/padjar.v4i2.40478>
- Syifa, S. R. (2024). Menuju integrasi ekonomi ASEAN: Implementasi local currency settlement antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(4), 808–816.
- Syifa, S. R. (2024). Towards ASEAN economic integration: Implementation of local currency settlement (LCS) between Indonesia, Malaysia and Thailand. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(4), 808–816. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10533243>
- Unknown, A. (2026). Local currency settlement (LCS) and ASEAN digital economic sovereignty. *SIYAR Journal*, 6(1).